

PERBANDINGAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ANTARA SMP NEGERI I DIWEK DAN MTS NEGERI KERAS DIWEK JOMBANG

Hanif Prasetyo

Tenaga Pendidik di MA Darul Ulum Bandung Diwek Jombang

prasetyohanif69@gmail.com

Khudriyah

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), STIT al Urwatul Wutsqo - Jombang

al.cued@yahoo.com

Abstract: This research pupose is to know the school based management implementation at SMP Negeri I Diwek and MTs Negeri Keras. The research uses qualitative approach. The data was collected using observation, interview, and documents as instrument. The result of this research showed that the school based management of both SMP Negeri I Diwek and MTs Negeri Keras by implementing five steps such as: (1) planning, included: situation analysis, formulating objectives and SWOT analysis, (2) implementation, (3) supervision, (4) evaluation, and (5). reporting. The target and gols can be achieved by supporting of various elements exist in the schools, adequate facilities, infrastructure, the work ethic and high morale of all elements. While the inhibiting factors of these two schools is not very meaningful, because both of them have done planning and consideration before the implementation of school-based management. Howeve, the facilities and infrastructure at MTs Negeri Keras is inadequate. The similarities between the two schools are able to implement school-based management properly, implement school and community relations, as well as carrying out monitoring and evaluation based on the ability of each school. The difference is in the form of a program that is implemented at both schools.

Key words: *comparation, school-based management, SMPN I Diwek, MTsN Keras*

Pendahuluan

Pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali, kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu

masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauhmana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna, sebagaimana tahapan pendidikan tersebut.¹

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu, baik dari sisi input, proses, output, maupun outcome. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.²

Menurut Sallis, sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga sekolah hanyalah pelaksana belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya, pendapat sallis ini mendukung pendapat Juram bahwa masalah mutu 85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya.³

Peningkatan kualitas pendidikan menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.⁴ Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.

Dewasa ini, manajemen pendidikan di Indonesia mengenal dua mekanisme pengaturan yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang perlu ditegaskan bahwa implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih

¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 287

² *Ibid*, 288

³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 496

⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 21

besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengolah pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.⁵ Otonomi juga diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.⁶

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi Undang-Undang no 22 dan 25 tahun 1999, dan direvisi menjadi UU RI no. 32 tahun 2004 dan UU RI tahun 33 tahun 2004, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan, bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten. Sehubungan dengan itu, manajemen berbasis sekolah ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standart kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada madrasah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. *Ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan

⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan"*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), 82

⁶ *Ibid*, 76

mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. *Keempat*, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.⁷

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan sebagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan serta sistem yang ada di sekolah.

Dalam kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah tampil sebagai paradigma baru pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan sekolah dan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada daerah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi secara berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek meso erat kaitannya dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah.⁸

Sedangkan tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi adalah diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi

⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* .,6-7

⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* .. 11

masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.⁹

Dan sebetulnya tujuan utama MBS di atas itu telah tertuang di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS butir (c):

Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹⁰

Disamping itu pula penjelasan tentang tujuan utama MBS tersebut telah tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 8 bagian ketiga tentang Hak dan kewajiban masyarakat, bab XI pasal 40 ayat 2 butir b tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dan bab XIV pasal 51 ayat 1 tentang pengelolaan pendidikan yang akan kami sebutkan di bawah ini:

1. Pasal 8, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
2. Pasal 40 ayat 2 butir b, bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban “mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pasal 51 ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.¹¹

⁹ *Ibid*, 13

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun: 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 1-2

¹¹ *Ibid.*, 9, 28, dan 34

Adapun alasan atau landasan berfikir yang mendorong penulis untuk menulis tesis ini adalah dengan mengambil pokok masalah tentang Manajemen Berbasis Sekolah di antaranya adalah:

1. Penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motifasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
2. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih bersifat dukungan dana bukan pada proses pendidikan.¹²
3. Pelaksanaan MBS sesungguhnya memerlukan tenaga yang memiliki ketrampilan yang memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip MBS karena selama ini tenaga yang ada, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pengawas kurang memiliki ketrampilan dalam profesi mereka.¹³

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memanfaatkan wawancara yang terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁴

¹² H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 82

¹³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* . 61

¹⁴ Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.¹⁵

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi, dokumentasi dan interview, dan untuk menganalisis data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Pembahasan

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan sumberdana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang profesional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat. Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu menampilkan pengelolaan sumberdaya secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada siswa.

Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi

¹⁵ *Ibid*, 4

untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat.

SMP Negeri I Diwek sebagai salah satu sekolah yang maju telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, dimana dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah ini SMP Negeri I Diwek sebagai lembaga pendidikan yang maju lebih mudah dalam mengatur dan mengelola pendidikannya.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I Diwek dalam Peningkatan Mutu Pendidikan berjalan dengan baik, hal ini didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap kondisi dan realitas yang ada, begitu juga dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian humas, dan komite sekolah yang menyampaikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah sebagai kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri I Diwek memperhatikan tahapan-tahapan sebelum menetapkan program dan kegiatan, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang akan dihadapi sekolah, yang tentunya didasarkan pada visi, misi sekolah, dan ciri khas sekolah, karena program yang dilaksanakan pada esensinya penjabaran dari visi dan misi sekolah, serta ciri khas sekolah.

Berkaitan dengan mutu pendidikan, SMP Negeri I Diwek membuat program yang sebelumnya telah dianalisis dan dilokakaryakan bersama dengan para guru, staff dan kepala bagian, dan komite sekolah, hal ini dilakukan agar semua elemen yang ada di sekolah, guna mengetahui dan ikut berperan serta dalam pelaksanaan program. Sebelum program dilokakaryakan kepala sekolah sebagai pimpinan memberikan rancangan program yang akan dilokakaryakan dan ditetapkan menjadi program peningkatan mutu pendidikan.

Program yang dirancang tadi kemudian dilokakaryakan dan dianalisis untuk mengetahui peluang dan hambatan yang akan dihadapi, kemudian ditetapkan dalam program dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Dalam pelaksanaan

program yang sudah ada kemudian diberikan kepada bagian yang melingkupinya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan dasar disesuaikan dengan job dan wewenang dari program tersebut. Hal ini, tujuan sesungguhnya dari penganalisaan dan penglokakaryaan program tersebut adalah untuk mengetahui peluang dan hambatan serta cara untuk mengatasi hal-hal yang akan dihadapi.

Di samping itu, SMP Negeri I Diwek ini berusaha untuk berinovasi dan berkreasi dari berbagai sektor, mulai dari guru, karyawan, tukang sapu, siswa, semuanya bahu membahu untuk satu tujuan, satu misi, dan satu visi untuk mengajarkan sekolah ini, sekolah yang unggul, kreatif, sehat, terampil, populis, santun, peduli, dan berbasis lingkungan.

Sedangkan upaya lain yang ditempuh adalah *pertama* meningkatkan kualitas lulusan yang terbaik, dengan merencanakan semaksimal mungkin sehingga dalam hal ini SMP Negeri I Diwek yakin bahwa dengan merencanakan program semacam ini nantinya akan menghasilkan kualitas lulusan yang baik. *Kedua*, memiliki siswa yang melanjutkan ke sekolah yang nilai Agreditasi A/B 99 %. *Ketiga*, Meningkatkan akhlakul karimah dari para lulusan. *Keempat*, meningkatkan kegiatan kesiswaan, seperti memiliki tim olah raga yang menjadi finalis tingkat propinsi dan nasional. *Kelima*, meningkatkan dan mengefektifkan hubungan dengan masyarakat yaitu dengan meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak (guru, karyawan sekolah, orang tua, siswa, Diknas, warga binaan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya).

Setiap satu minggu sekali SMP Negeri I Diwek mengadakan evaluasi dengan semua komponen yang ada di sekolah ini, sehingga diharapkan dari evaluasi tersebut semua warga SMP Negeri I Diwek dapat meningkatkan kinerjanya, dan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan muncul di masa mendatang dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

MTs Negeri Keras Diwek sebagai salah satu sekolah negeri telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, dimana dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah ini MTs Negeri Keras Diwek sebagai lembaga

pendidikan yang maju lebih mudah dalam mengatur dan mengelola pendidikannya.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek yang bertujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan berjalan dengan baik, hal ini didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap kondisi dan realitas yang ada, begitu juga dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah bagian kurikulum, wakil kepala madrasah bagian humas, dan komite madrasah yang menyampaikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah sebagai kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek setidaknya memperhatikan tahapan-tahapan sebelum menetapkan program dan kegiatan, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahan yang akan dihadapi madrasah, yang tentunya didasarkan pada visi, misi sekolah, dan ciri khas madrasah, karena program yang dilaksanakan pada esensinya penjabaran dari visi dan misi madrasah, serta ciri khas madrasah.

Tahapan-tahapan tersebut yaitu pertama pihak madrasah harus melakukan analisis situasi, hal ini untuk melihat bagaimana kesiapan madrasah dalam melaksanakan peningkatan mutu madrasah. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan madrasah berpedoman pada visi dan misi madrasah, karena sasaran yang ingin dicapai tercermin dalam visi dan misi madrasah. Yang ketiga adalah analisis swot, hal ini untuk melihat bagaimana kemampuan, kekurangan, kelebihan, hambatan, dan tantangan yang ada di MTs Negeri Keras Diwek.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, MTs Negeri Keras Diwek merumuskan program yang sebelumnya sudah dianalisis dan dilokakaryakan bersama antara kepala madrasah, wakil madrasah, guru, staff, pegawai, dan komite madrasah yang ada di MTs Negeri Keras Diwek. Sebagai pimpinan kepala madrasah memberikan suatu rancangan program yang akan dilokakaryakan. Dari hasil rancangan tersebut

kemudian dianalisis untuk melihat kebutuhan madrasah dan kebutuhan masyarakat saat ini. Setelah diidentifikasi apa yang dibutuhkan, kemudian rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi program yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Program yang dirancang tadi kemudian dilokakaryakan dan dianalisis untuk mengetahui peluang dan hambatan yang akan dihadapi, kemudian ditetapkan dalam program dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Dalam pelaksanaan program yang sudah ada kemudian diberikan kepada bagian yang melingkupinya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan dasar disesuaikan dengan job dan wewenang dari program tersebut. Hal ini, tujuan sesungguhnya dari penganalisaan dan penglokakaryaan program tersebut adalah untuk mengetahui peluang dan hambatan serta cara untuk mengatasi hal-hal yang akan dihadapi.

Di samping itu, dua minggu sekali MTs Negeri Keras Diwek juga mengadakan evaluasi dengan semua komponen yang ada di sekolah ini, sehingga diharapkan dari evaluasi tersebut semua warga MTs Negeri Keras Diwek dapat meningkatkan kinerjanya, dan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan muncul di masa mendatang dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun factor yang mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I Diwek adalah Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan tenaga pengajarnya yang profesional semua bapak/ibu guru telah memiliki etos kerja yang baik dalam mentransformasikan ilmu dan keteladanannya, tenaga pengajar yang sesuai bidangnya, adanya kebersamaan, keluarga yang harmonis, motivasi. Faktor pendukung inilah yang menjadi penunjang manajemen pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri I Diwek.

Sedangkan faktor penghambat manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri I Diwek tidak terlalu berarti, karena sebelum melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini sekolah sudah melakukan perencanaan dan dipertimbangkan dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya sekolah benar-benar telah siap.

Sementara MTs Negeri Keras Diwek sebagai lembaga pendidikan, banyak hal yang menjadi pendukung dalam upaya melaksanakan MBS, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat (wali murid), maupun dari sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah input siswa, dana, dan kemampuann ekonomi dari siswa. Namun dari tiga penghambat yang diidentifikasi tersebut madrasah tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan MBS, karena pihak madrasah telah mencari solusi agar penghambat tersebut dapat diminimalisir. Bahkan dengan adanya faktor penghambat ini madrasah juga bisa menjadikannya sebagai bahan untuk dievaluasi, apa yang masih kurang dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri Keras Diwek bisa diperbaiki dalam waktu yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Antara SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek. Adapun persamaan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah antara SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras diantaranya adalah dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah dengan berjalan baik berdasarkan latar belakang masing-masing sekolah, dapat melaksanakan hubungan sekolah dan masyarakat dengan berjalan baik berdasarkan strategi masing-masing sekolah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan kemampuan pihak sekolah masing-masing. Dan perbedaan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah antara SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras diantaranya adalah bentuk program yang dilaksanakan pada kedua sekolah, karena latar belakang yang berbeda, sebuah wadah dalam berkoordinasi dengan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang sangat berbeda.

Penutup

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek ada lima (5) langkah yang dilakukan, diantaranya ialah: (1) Tahap-tahap Perencanaan, yang meliputi: Analisis Situasi, Merumuskan sasaran, dan Analisis SWOT, (2) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dan (3) Pengawasan, (4) Evaluasi, dan (5). Pelaporan.

Faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I Diwek adalah : (1) Dukungan dari berbagai elemen yang ada di sekolah, guru, staff, kepala bagian, orang tua siswa, dan masyarakat, (2) Sarana dan prasarana (perpustakaan, lab. komputer, lab. IPA, R. Kesenian, R. Ketrampilan, R. Budi daya, dan lap. Olah raga) yang memadai, dan (3) Etos kerja dan semangat yang tinggi dari semua elemen yang ada, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I tidak terlalu berarti, karena sebelum melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini sekolah sudah melakukan perencanaan dan dipertimbangkan dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya sekolah benar-benar telah siap.

Faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek adalah : (1) Dukungan dari berbagai elemen yang ada di sekolah, guru, staff, kepala bagian, orang tua siswa, dan masyarakat, (2) Sarana dan prasarana (perpustakaan, lab. komputer, lab. IPA, R. Kesenian, R. Ketrampilan, R. Budi daya, dan lap. Olah raga) yang dirasa masih kurang memadai, dan (3) Etos kerja dan semangat yang tinggi dari semua elemen yang ada, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

Dan faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek juga tidak terlalu berarti, karena sebelum melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini sekolah sudah melakukan perencanaan dan dipertimbangkan dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya sekolah benar-benar telah siap. Diantara penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek antara lain adalah:

1. Input siswa, karena mereka terpengaruh dari lingkungan tempat mereka bergaul di luar madrasah yang berbeda dengan pola lingkungan di MTs Negeri Keras Diwek.
2. Kemampuan ekonomi dari siswa, dengan kemampuan orang tua siswa yang lemah pihak madrasah sedikit mengalami kesulitan dalam merealisasikan program yang ada.

3. Dana, karena kegiatan yang dilakukan tidak mungkin pada jam pelajaran dan harus dilakukan diluar jam pelajaran, maka resikoanya kalau mengadakan diluar jam pelajaran membutuhkan dana yang lainnya.

BIBLIOGRAFI

- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan”*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun: 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2003